KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 4 4 6				H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final			
			III IIII					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 541 5 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : KST. PALUPI HAPSARI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJ (mm-yyy	INODE OBCERT	AJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01		7.537.500	7.537.500	0	15	1.130.625	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 17								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Sul	ounit Organisasi	:						
C.4 Tanggal :		2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya		
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperli	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	. mengatur bahwa dol	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

EDTV4S7G